

EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Annisa Maharani Putri

NPP. 30.0447

Asdaf Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0447@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Anindita Primastuti, SE., ME

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The fundamental requirement when meeting the needs of a program for each agency or activity unit is the availability of a budget which is then allocated to each program that has been planned or provided. Budget plays an important role in an organization. Regional finance has several components, namely revenue, expenditure and regional financing. Regional Expenditure is a part that originates from the Regional Revenue and Expenditure Budget where the regional expenditure is structured to finance the interests of the regional government aimed at improving the welfare of the community. As we know, regional expenditure includes capital expenditure, which in general affects financial institutions in the OPD socio-economic environment. Therefore, this capital expenditure is very important for us to pay attention to because it also affects the welfare of the community.* **Purpose:** *The purpose of this study is to understand and describe the Effectiveness of Capital Expenditures in the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Bandar Lampung, Lampung Province, to identify and understand the Inhibiting Factors in the Effectiveness of Capital Expenditures in the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Bandar Lampung, Lampung Province, as well as the Agency's efforts Regional Financial and Asset Management of Bandar Lampung City, Lampung Province in increasing Capital Expenditure Effectiveness.* **Method:** *This research uses a type of qualitative research by conducting studies on opd that manage local government finances. The data used was taken from the Regional Financial and Asset Management Agency as the manager of regional government finances.* **Result :** *The results of the study show that there is a significant difference in capital expenditure from 2020 to 2021 and why capital expenditure is less effective. This study uses the Capital Expenditure Effectiveness Ratio and Edy Sutrisno's Effectiveness Theory which explains program understanding, right on target, on time, goal achievement, and real change.* **Conclusion :** *The performance of capital expenditure implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Bandar Lampung in Lampung Province in 2021 experienced a decrease in effectiveness due to budget changes in 2021 which led to refocusing and budget reallocation for Covid-19. Efforts made by the Regional Financial and Asset Management Agency are trying to provide online services.* **Keywords:** *Budget, Capital Expenditures, Effectiveness*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Kebutuhan fundamental saat memenuhi kebutuhan dalam suatu program tiap instansi atau unit kegiatan ialah tersedianya anggaran yang selanjutnya*

dialokasikan kepada masing masing program yang telah direncanakan ataupun disediakan. Anggaran memegang peranan penting pada suatu organisasi. Keuangan daerah mempunyai beberapa komponen yaitu pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Belanja Daerah ialah suatu bagian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mana belanja daerah itu disusun dalam membiayai kepentingan pemerintah daerah yang ditujukan dalam menyejahterakan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di dalam belanja daerah terdapat belanja modal yang dimana Belanja modal ini secara garis besar mempengaruhi keuangan lembaga dalam lingkungan sosial ekonomi OPD. Oleh karna itu, belanja modal ini sangat penting untuk kita perhatikan karna berpengaruh juga untuk kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, untuk mengetahui dan memahami Faktor Penghambat dalam Efektivitas Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, serta upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dalam meningkatkan Efektivitas Belanja Modal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan studi pada opd yang mengelola keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan pada belanja modal dari tahun 2020 menuju 2021 dan mengapa terjadi kurang Efektif-nya belanja modal. Penelitian ini menggunakan Rasio Efektivitas Belanja Modal serta Teori Efektivitas dari Edy Sutrisno yang menjelaskan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata. **Kesimpulan:** Kinerja pelaksanaan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalami penurunan Efektivitas karena adanya perubahan anggaran pada tahun 2021 yang menyebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu mengupayakan dengan pelayanan online.

Kata kunci: Anggaran, Belanja Modal, Efektivitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur serta menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri pada pemerintahan daerah diharapkan bisa menyampaikan motivasi dalam meningkatkan potensi yang terdapat di daerah dalam mewujudkan pemerintahan secara terpadu supaya setiap perkembangan yang sudah ada sinkron dengan prioritas serta dapat menaikkan kapasitas masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah cara Pemerintah Daerah mengelola keuangannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausaha, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Otonomi daerah yang berhasil tidak terluput dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah serta rakyat bisa mengetahui kemampuan APBD membiayai belanja daerah, dan memperlihatkan bahwa dana/uang publik sudah digunakan dengan hemat, efisien, serta Efektif.

Anggaran memegang peranan penting pada suatu organisasi. Perencanaan keuangan disusun terperinci dalam membantu mencapai rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi. Bermacam- macam keinginan masyarakat bagi organisasi publik yaitu terbuka serta akuntabilitas keuangan publik. Sehingga tiap organisasi pemerintah akhirnya membuat kinerjanya meningkat agar tata kelola pemerintah bisa tercapai (Tamasoleng, 2015). Perencanaan anggaran yang lemah dapat menyebabkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang dapat memengaruhi angka Efektivitas anggaran. Keuangan daerah mempunyai beberapa komponen yaitu pendapatan, belanja serta

pembiayaan daerah. Belanja Daerah adalah suatu bagian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana belanja daerah itu disusun dalam membiayai kepentingan pemerintah daerah yang ditujukan dalam menyejahterakan masyarakat. Pasal 1 ayat (19) Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019 menyatakan “Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah, kemudian disepakati sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih di periode tahun anggaran”. Seperti yang kita ketahui, di dalam belanja daerah terdapat belanja modal yang dimana belanja modal ini secara garis besar mempengaruhi keuangan lembaga dalam lingkungan sosial ekonomi OPD. Oleh karena itu, belanja modal ini sangat penting untuk kita perhatikan karena berpengaruh juga untuk kesejahteraan masyarakat. Belanja modal ialah pengeluaran anggaran dalam perolehan aset tetap serta aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dari hal tersebut pengelolaan belanja modal oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara tertib, Efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan (UU No 17 Tahun 2003) . Sehingga pemerintah mendapatkan tugas negara dalam membuat manajemen keuangan, awal dari pemerintah pusat kepada pmda (provinsi, daerah / kota) seluruhnya mempunyai kewajiban dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah yang sesuai, tertib serta menggunakan prinsip yang Efektif menjadi kewajiban hukum penyelenggara negara.

Efektivitas anggaran sangat mempengaruhi kinerja, dan kinerja pemerintah dianggap baik jika pemerintah dapat mengEfektifkan pengeluaran dan dapat mengidentifikasi anggaran hingga anggaran bisa mencapai apa yang ingin dicapai. Efektif atau tidak Efektifnya penggunaan anggaran yang berasal dari rakyat ialah saat anggaran itu di belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan di perencanaan awal atau sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 mempunyai beberapa kriteria keuangan Efektivitas, yaitu 100% dikatakan sangat Efektif, 90%-80% dikatakan Efektif, 80%-90% dikatakan cukup Efektif, 60%-80% dikatakan kurang Efektif, serta di bawah 50% dikatakan tidak Efektif. Adapun bisa kita lihat pada tabel 1.1 Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut :

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi	%
2018	1,306,000,000.00	1,211,293,600.00	92,74%
2019	1,434,500,000.00	1,331,336,000.00	92,80%
2020	893,272,000.00	808,694,000.00	90,53%
2021	547,068,000.00	401,970,000.00	73,47%

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung (data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan pada tahun 2018 sampai 2020 dapat dikatakan Efektif , namun berbeda pada tahun 2021 persentasi pencapaian yaitu 73,74% yang dimana mengalami penurunan signifikan yang bisa dikatakan kurang Efektif. Dengan adanya permasalahan turunnya rasio Efektivitas belanja modal yang terjadi dari 2018 sampai 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tentu saja menjadi tugas penting bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengelola belanja modal dengan lebih baik kedepannya. Jika belanja modal telah Efektif, maka target anggaran tersebut bisa menjadi pedoman untuk anggaran ditahun selanjutnya. Menurut Eva Dwiana selaku Wali Kota Bandar Lampung, saat penyampaian KUA dan PPAS perubahan APBD 2022 pada Sidang Paripurna mengatakan bahwa: Belanja daerah Kota Bandar Lampung pada perubahan APBD tahun 2022 lebih besar daripada pendapatan daerah. Belanja daerah Kota Bandar Lampung hingga akhir

2022 direncanakan Rp. 3,007 triliun, sementara pendapatan daerah hanya diproyeksikan Rp.2,486 triliun. Komposisi perubahan APBD yakni belanja operasi 79,33%, belanja modal 19,25%, dan belanja tidak terduga 1,42%. (*Published by rmollampung.id on 12 August 2022*)

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian, melihat dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya sangatlah penting. Walaupun terdapat perbedaan masalah maupun teori yang digunakan, namun penelitian sebelumnya membantu peneliti menemukan solusi terhadap penelitian ini. Penelitian Widowati dan Fatimah dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018), penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menggambarkan Efektivitas pada tahun 2015 dikatakan kurang Efektif, pada tahun 2016 – 2018 termasuk dalam karakteristik yang cukup Efektif. Dalam menjalankan anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Magelang kota telah terolah secara efisien yang pada tahun 2015 dan 2016 dikategorikan sangat efisien dan 2017 sampai 2018 dikategorikan efisien. Penelitian selanjutnya dari Cici Sitti Hejaerah Bunna tahun 2021, dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, menggunakan metode penelitian deskriptif yang dikaji dengan cara kuantitatif. Hasil penelitian yaitu Efektivitas belanja di BPD Kab. Wajo dikatakan sangat Efektif. Sedangkan efisiensi belanja BPD Kab. Wajo dikatakan belum memenuhi syarat efisiensi karna secara keseluruhan belum dilaksanakan secara baik. Selanjutnya yaitu penelitian dari Rano Asoka tahun 2019 berjudul Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan pada penelitian ini, Efektivitas pada tahun 2016-2018 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan Efektif. Penelitian selanjutnya dari Muhammad Herman Djaja tahun 2015, dengan judul Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pamekasan, menggunakan Metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dapat disimpulkan Kontribusi belanja langsung dari tahun 2009- 2010 masih kurang kecuali pada Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 50% dan dapat dikatakan efektif. Penelitian terakhir yaitu dari Oktania Nurussyfa, Endang Kartini Panggiarti pada tahun 2020 dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan menggunakan metode penelitian studi deskriptif statistic dengan pendekatan Kuantitatif. Adapun hasil yaitu Pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung sudah dikelola dan terlaksana secara efektif dan efisien.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki suatu keterbaruan ilmiah dimana berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian sebelumnya menganalisis Efektivitas anggaran belanja modal di dinas perdagangan dan perindustrian. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis Efektivitas belanja modal di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan merupakan

perbandingan kondisi sebelum, saat dan sesudah pandemic Covid-19 yang mana masih sangat sedikit yang meneliti hal tersebut.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan Efektivitas Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, untuk mengetahui dan memahami Faktor Penghambat dalam Efektivitas Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, untuk mendeskripsikan Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Efektivitas Belanja Modal.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metodologi penulisan kualitatif. Adapun jenis pendekatan pada penelitian ini merupakan deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif (Yuliani, 2018). Teknik dalam menentukan informan untuk penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai dasar dalam penelitian, pengumpulan data dari lapangan perlu dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melaksanakan penelitian dan mendapatkan data dari lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung kemudian menuliskan hasil penelitian lalu membahasnya. Penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lainnya dari beberapa informasi yaitu: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung serta Staf Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Penulis dalam penelitian ini melakukan penilaian terhadap Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Bandar Lampung pada tahun 2018 sampai 2021.

Tabel 4. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi
2018	1,306,000,000.00	1,211,293,600.00
2019	1,434,500,000.00	1,331,336,000.00
2020	893,272,000.00	808,694,000.00
2021	547,068,000.00	401,970,000.00

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung (data diolah oleh penulis 2023)

Tingkat Efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori salah satunya yaitu menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Berikut kriteria Efektivitas :

Tabel 4. 2 Kriteria Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas	Tanda/Kode
100% ke atas	Sangat Efektif	SE
90% sampai 100%	Efektif	E
80% sampai 90%	Cukup Efektif	CE

60% sampai 80%	Kurang Efektif	KE
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	TE

Sumber : Kepmendagri Tahun 1996 No 690.900.327

Dapat kita lihat Rasio Efektivitas Belanja Modal serta perhitungan Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 sampai 2021, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas belanja modal} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}}{\text{Anggaran belanja modal}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1,211,293,600.00}{1,306,000,000.00} \times 100\% = 92,74\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1,331,336,000.00}{1,434,500,000.00} \times 100\% = 92,80\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{808,694,000.00}{893,272,000.00} \times 100\% = 90,53\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{401,970,000.00}{547,068,000.00} \times 100\% = 73,47\%$$

Tabel 4. 3 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2018	1,306,000,000.00	1,211,293,600.00	92,74%	E
2019	1,434,500,000.00	1,331,336,000.00	92,80%	E
2020	893,272,000.00	808,694,000.00	90,53%	E
2021	547,068,000.00	401,970,000.00	73,47%	KE

Sumber: Data diolah, (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat tingkat Efektivitas anggaran Belanja Modal pada Tahun 2018 berada pada rasio 92,74% (Efektif), kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 92,80% (Efektif), pada tahun 2020 rasio Efektivitas menurun menjadi 90,53% (Efektif), Kemudian tahun 2021 rasio Efektivitas menurun drastis menjadi 73,34% (Kurang Efektif). Dilihat dari jumlah target dana realisasi belanja modal Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 adanya pandemi Covid-19 dimana anggaran belanja modal di fokuskan untuk Covid-19, sehingga dapat diartikan kinerja pelaksanaan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalamai penurunan Efektivitas yang signifikan. Adapun dapat kita lihat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2021 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2021 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

No	Belanja Modal	TAHUN 2020		
		Anggaran	Realisasi Triwulan IV	Persentase
1.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	22,600,000.00	21,800,000.00	96.46
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	12,600,000.00	12,000,000.00	95.23

	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	10,000,000.00	9,800,000.00	98.00
2.	BELANJA MODA PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	198,080,000.00	146,680,000.00	74.05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Belanja Modal Pengadaan almari	77,080,000.00	77,080,000.00	100.00
	Belanja Modal Pengadaan AC Kipas Angin	16,000,000.00	15,800,000.00	98.75
	Belanja Modal Pengadaan Hexos Pan	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00
3.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	652,554,000.00	640,214,000.00	98.10
	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe server	28,700,000.00	28,600,000.00	99.65
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	269,250,000.00	268,475,000.00	99.71
	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	197,500,000.00	195,650,000.00	99.06
	Belanja Modal Pengadaan printer	71,894,000.00	69,650,000.00	96.87
	Belanja Modal Pengadaan scanner	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	Belanja Modal Pengadaan UPS stabilizer	59,600,000.00	53,729,000.00	90.14
	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	15,610,000.00	14,110,000.00	90.39
4.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	20,038,000.00	0.00	0.00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Tempat Kerja	20,038,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	893,272,000.00	808,694,000.00	90.53
		TAHUN 2021		
No	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi Triwulan IV	Persentase
1.	BELANJA MODAL PERALATAN MESIN	22,600,000.00	21,800,000.00	96.46
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12,600,000.00	12,000,000.00	95.23
	Belanja Modal Komputer	10,000,000.00	9,800,000.00	98.00
2.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	198,080,000.00	146,680,000.00	74.05
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	77,080,000.00	77,080,000.00	100.00
	TOTAL	547,068,000.00	401,970,000.00	73,47%

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung (data diolah oleh penulis 2023)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan APBD baik dari penyusunan serta penerapan juga dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) dalam bukunya mengemukakan bahwa Efektivitas suatu program dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selain menghitung Rasio Efektivitas Belanja Modal, peneliti juga melihat Efektivitas Organisasi menurut Edy Sutrisno (2007:125-126), sebagai berikut :

A. Pemahaman Strategi terhadap Tujuan yang Hendak Dicapai

Pemahaman strategi diartikan sebagai pemahaman terkait ilmu atau kiat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

1. Penyusunan Perencanaan terhadap anggaran

Perencanaan diartikan sebagai suatu usaha dalam melaksanakan kegiatan tertentu yang dilakukan guna menjalankan rencana atau program sehingga dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan, salah satunya penyusunan perencanaan terhadap anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak M. Nur Ram'dhan, M.Acc., Akt., CGAE., CA pada hari Rabu, 25 Januari 2023 : Untuk penyusunan anggaran, kita tetap mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah sesuai dengan tahun yang ditetapkan. Penyusunan

anggaran biasanya melihat juga dari tahun lalu, apakah ada terdapat program yang belum dilaksanakan ataupun program pengajuan baru yang akan dimasukkan ke anggaran selanjutnya. Tetapi sejauh ini berjalan dengan baik, kecuali untuk anggaran 2021 yang dimana kami harus menyesuaikan dengan peraturan yang terjadi pada saat itu yang dimana terjadinya Covid-19 yang menyebabkan anggaran diharuskan untuk realokasi dan refocusing untuk covid-19. Jadi terjadi penyusunan perencanaan anggaran lagi yang harus kami lakukan dengan bertahap. Namun masih bisa kami handle dengan sebaik mungkin walaupun akan terjadinya perlambatan dalam pelaporan dikarenakan waktu yang diberikan pemerintah pusat termasuk singkat.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan beliau dapat dilihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah yang berlaku dan mengikuti instruksi yang telah ditetapkan guna mengelola anggaran belanja modal. Pendapat lain disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M. terkait permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah pada hari Rabu, 25 Januari 2023 : Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran yaitu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dimana anggaran harus berfokus ke Covid-19, jadi program program yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan semestinya karna kita juga harus mengikuti perintah dari pusat. Apalagi kita mengalami Work From Home (WFH) yang dimana pelayanan juga dilakukan secara terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa permasalahan yang ditemukan dalam proses penyusunan anggaran terdapat pada waktu dan keterbatasan ruang gerak karena pada tahun 2021 terjadinya Covid-19 yang menyebabkan banyak terjadinya peraturan yang diubah. Berdasarkan uraian di atas, penyusunan perencanaan terhadap anggaran pada faktor pemahaman strategi dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup Efektif.

2. Pemahaman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan adalah metode yang menggambarkan cara atau alur penyelesaian pekerjaan yang berjalan dengan sistematis yang meliputi tahapan atau urutan pelaksanaan suatu kegiatan maupun uraian dan cara kerja dari masing-masing jenis pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara teknis, salah satunya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi informasi tentang keuangan publik diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan dan operasi pemerintah telah berjalan sesuai kerangka kebijakan fiskal pemerintah dan tunduk pada manajemen anggaran dan pengaturan pelaporan yang memadai. Transparansi adalah fitur penting yang memungkinkan adanya pengawasan eksternal atas kebijakan dan program pemerintah serta implementasinya, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Untuk keterbukaan dan transparansi ini dapat dijelaskan bahwa APBD disampaikan kepada DPRD dan DPRD kemudian melakukan pembahasan atau evaluasi terbuka untuk umum, selain pihak DPRD dan tim eksekutif dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah dan dihadiri oleh kepala-kepala perangkat pemerintah daerah (SKPD), juga dihadiri oleh masyarakat dan wartawan serta dihadiri oleh instansi TNI Polri, dan hal ini merupakan bagian dari keterbukaan dan transparansi yang dilakukan, karena dalam pembahasannya tidak saling menutupi, dan untuk aplikasi juga sudah sangat terbuka dan transparansi karena sudah terinci sampai dengan objek rincian belanja.

Pendapat lain disampaikan oleh salah satu Staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Ibu Efa Saftiawaty, S.Si., M.T. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 : Transparansi dalam pengelolaan anggaran di Kota Bandar Lampung secara manual

sudah terbuka untuk umum juga melalui situs web pemerintah daerah, sehingga mudah diakses dan dilihat bagaimana perubahan anggaran setiap tahunnya. Namun, sering terjadi keterlambatan dalam penginputan ringkasan realisasi anggaran pada situs web, namun setelahnya sudah kembali seperti biasanya.

Berdasarkan hal pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung lebih transparansi karena dapat dilihat pada saat kegiatan pembahasan dan evaluasi selalu menghadirkan beberapa instansi juga masyarakat. Selain itu, pemerintah juga lebih terbuka terkait pengelolaan anggaran yang dapat dilihat pada situs web pemerintah daerah yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, pemahaman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada faktor pemahaman strategi dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dapat dikatakan Efektif.

B. Tepat Sasaran dalam Mencapai Target

Tepat sasaran atau dengan kata lain Efektif merupakan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan maupun derajat keberhasilan suatu operasional atau system yang dibentuk sehingga dapat berjalan secara Efektif. Adapaun indicator tepat sasaran yang peneliti ambil dan digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan yaitu realisasi.

1. Realisasi Belanja Modal

Realisasi merupakan perwujudan atau proses menjadikan nyata. Realisasi Belanja Modal merupakan penggunaan secara nyata anggaran belanja pemerintah dalam hal ini belanja modal yang telah diotorisasikan selama satu tahun fiskal untuk membayar hutang belanja dan membiayai kegiatan pemerintah dalam periode yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Bapak M. Nur Ram'dhan, M.Acc., Akt., CGAE., CA pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Belanja Modal tentunya alat ujinya adalah pertanggungjawaban dari masing-masing OPD, dan diyakini bahwa masing-masing OPD sudah maksimal secara Efektif dan efisien dalam pengelolaannya dan sampai saat ini yang diketahui bahwa pengelolaan belanja modal tidak ditemukan masalah yang sangat signifikan kecuali pada tahun 2021 dimana refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19, namun yang paling berwenang untuk mengevaluasi yaitu para auditor internal maupun eksternal.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam hal Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah melaksanakan dengan cukup baik karena tidak ditemukan adanya masalah yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, realisasi belanja modal pada faktor tepat sasaran dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup Efektif.

C. Tepat Waktu dalam Mencapai Target

Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan, ketepatan dapat berupa gerakan yang dilakukan untuk menjalankan sistem sehingga sasaran dari perencanaan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu.

1. Ketepatan dalam perubahan anggaran

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Kota Bandar Lampung sendiri sudah menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangannya, sehingga untuk penganggaran Belanja Modal juga penganggaran APBD sudah sesuai dengan regulasi tentang SIPD yang menggunakan system buka-tutup, yang artinya pada saat jadwal pelaksanaan APBD, maka system untuk penginputan data atau penyusunan APBD akan dibuka oleh kementerian serta sudah ditentukan langsung berapa lama waktu yang diperlukan, dan pada saat penyusunan APBD sudah lewat maka sistemnya akan tertutup atau terkunci secara otomatis, dan pada saat itulah proses perubahan anggaran Belanja Modal akan menunggu sampai jadwal pembukaan penyusunan APBD perubahan dan paling lambat 6 bulan, kecuali ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk membuat perubahan mendahului tergantung urgensi Belanja Modal.

Pelaksanaan penyusunan maupun pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung sudah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi ke seluruh Indonesia dan lebih terstruktur serta terarah karena sistemnya langsung dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 sampai 2020 semua berjalan lancar dan terkendali, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan Efektivitas dikarenakan perubahan anggaran untuk Covid-19 dan itu memerlukan waktu yang tidak singkat, jadi kita harus menyesuaikan peraturan dari pusat.

Berdasarkan uraian di atas, ketepatan faktor tepat waktu dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada 2018 sampai 2020 bisa dikatakan Efektif, tetapi pada tahun 2021 dinyatakan kurang Efektif dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang dimana anggaran mengalami perubahan untuk fokus ke anggaran covid-19. Sehingga, perubahan anggaran ini menyebabkan faktor tepat waktu dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung bisa dikatakan kurang Efektif.

2. Ketepatan waktu laporan

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespon setiap kejadian dan permasalahan. Apabila informasi itu tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai didalam mempengaruhi kualitas keputusan informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil yang wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Bapak M. Nur Ram'dhan, M.Acc., Akt., CGAE., CA pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyampaian laporan Belanja Modal memang tidak ditemui hambatan dan kendala yang signifikan, tetapi kami terlambat dalam penyampaian laporan realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2021 dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19, tetapi masih bisa kita handle dan bisa dibilang pengelolaan keuangan kami paling baik daripada OPD- OPD lainnya.

Pendapat lain disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Dalam penyampaian pelaporan belanja modal memang tidak terdapat kendala yang signifikan, walau dapat dilihat dari kondisi Kota Bandar Lampung dalam kasus covid-19 tidak sama seperti daerah lain contohnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga dalam penyampaian laporannya pada tahun 2018 sampai 2020 dapat terlaksanakan tepat pada waktunya baik online maupun offline, sedangkan penyampaian laporan pada tahun 2021 harus mengalami kendala yaitu pandemi covid-19 yang dimana refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19. Penyusunan anggaran belanja maupun pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Bandar Lampung sudah dilakukan secara maksimal walau pada tahun 2021 terjadinya kendala yang dikarenakan Covid-19 yang akhirnya menyebabkan keterlambatan waktu dalam pelaporan. Berdasarkan uraian di atas, ketepatan waktu laporan pada faktor tepat waktu dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung kurang Efektif.

D. Tercapai Tujuan akan Target yang telah direncanakan

Tercapainya tujuan menunjukkan bahwa realisasi sebuah misi yang cukup spesifik telah terealisasi atau terpenuhi.

1. Kesejahteraan masyarakat meningkat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023:

Dilihat dari pengelolaan anggaran belanja modal yang terjadi dari tahun 2020 ke 2021 yang dimana mengalami penurunan Efektivitas dikarenakan adanya pandemi covid-19, tetapi kami telah mengupayakan dengan baik atas hal tersebut. Walaupun kami terdapat Work From Home tetapi semua pelayanan masih bisa kami lakukan dengan online yang dimana masyarakat bisa mendapat pelayanan dengan baik walaupun pandemi covid-19. Hal ini dibantu juga dengan upaya pemerintah yaitu dengan terus melakukan swiping dijalan terkait protocol kesehatan seperti penggunaan masker, pembuatan tempat cuci tangan dan fasilitas handsanitizer di tempat-tempat umum, serta pendisiplinan vaksin bagi masyarakat kota bandar lampung. Berdasarkan uraian tersebut, kesejahteraan masyarakat meningkat pada faktor tercapai tujuan dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sudah Efektif.

2. Meningkatkan standar pengelolaan belanja modal

Belanja daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan strategis pemerintah serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pengelolaan belanja harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan. Pengelolaan belanja sendiri mencakup mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan. Pada masa pandemi covid ini, dalam pengelolaan keuangan salah satunya belanja modal sudah pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya.

Pendapat lain disampaikan oleh salah satu Staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Bapak Andi Budiman, S.E. pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Dalam pengelolaan anggaran belanja, dapat dikatakan sudah baik karena minim kendala dan hambatan. Selain itu BPKAD Kota Bandar Lampung juga sudah menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan, dan kendala yang berarti terdapat pada waktu yang diberikan oleh kementerian dalam penginputan data sangatlah singkat, sehingga seluruh perangkat yang menangani masalah keuangan harus bekerja lebih ekstra agar tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penginputan data anggaran APBD.

Berdasarkan uraian di atas, meningkatkan standar pengelolaan belanja modal pada faktor tercapai tujuan dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung cukup Efektif.

E. Perubahan Nyata terhadap Target yang telah Dicapai

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dengan hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengupayakan anggaran belanja modal tersebut terealisasi dengan baik walau terjadi perubahan anggaran pada tahun 2021 yang dimana terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan anggaran tersebut kurang Efektif, tetapi dari tahun 2018-2020 anggaran belanja modal telah terlaksanakan dengan Efektif. Jika anggaran terelasisasikan dengan Efektif, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dikarenakan pelayanan kepada masyarakat dijalankan dengan optimal. Contohnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung berupaya melakukan pelayanan online agar masyarakat bisa menjangkau pelayanan dengan mudah walaupun adanya pandemi Covid-19. Oleh karna itu, dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berharap hal itu membantu masyarakat dengan baik dan juga secara merata, dan dapat dilihat dari kasus covid-19 yang terjadi di Kota Bandar Lampung, tiap harinya menurun bahkan sampai saat ini telah terjadi pemberhentian PPKM.

Berdasarkan uraian di atas, terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada faktor perubahan nyata dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung cukup Efektif.

3.2. Faktor – Faktor Penghambat Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Melaksanakan suatu kebijakan tentu terdapat hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal, berdasarkan dari sumber baik media ataupun wawancara, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi masalah yang ditemui, baik dari proses penyusunan serta pelaporan keuangan. Adapun faktor- faktor penghambat dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandar Lampung, yakni:

1. Tidak Tepat Waktu dalam Mencapai Target

Peneliti sebelumnya telah menjelaskan diatas tentang Tepat Waktu dalam Mencapai Target, tetapi ternyata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandar Lampung dalam mencapai target anggaran Belanja Modal tidak tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri sudah menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangannya, sehingga untuk penganggaran Belanja Modal juga penganggaran APBD sudah sesuai dengan regulasi tentang SIPD yang menggunakan system buka-tutup, yang artinya pada saat jadwal pelaksanaan APBD, maka system untuk penginputan data atau penyusunan APBD akan dibuka oleh kementerian serta sudah ditentukan langsung berapa lama waktu yang diperlukan, dan pada saat penyusunan APBD sudah lewat maka sistemnya akan tertutup atau terkunci secara otomatis, dan pada saat itulah proses perubahan anggaran Belanja Modal akan menunggu sampai jadwal pembukaan penyusunan APBD perubahan dan paling lambat 6 bulan, kecuali ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk membuat perubahan mendahului tergantung urgensi Belanja Modal.

Pelaksanaan penyusunan maupun pelaporan sudah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi ke seluruh Indonesia dan lebih terstruktur serta terarah karena sistemnya langsung dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 sampai 2020 semua berjalan lancar dan terkendali, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan Efektivitas dikarenakan perubahan anggaran untuk Covid-19 dan itu memerlukan waktu yang tidak singkat, jadi kita harus menyesuaikan peraturan juga arahan dari pusat.

Berdasarkan uraian di atas, ketepatan faktor tepat waktu dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada 2018 sampai 2020 bisa dikatakan Efektif, tetapi pada tahun 2021 dinyatakan kurang Efektif dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang dimana refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19. Sehingga, perubahan anggaran ini menyebabkan faktor tepat waktu dalam Efektivitas Belanja Modal pada tahun 2021 bisa dikatakan kurang Efektif.

2. Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal yang Tidak Tepat Waktu

Dalam penelitian di atas telah dibahas tentang Ketepatan Waktu Laporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan laporan realisasi belanja modal tidak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hasil yang wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Bapak M. Nur Ram'dhan, M.Acc., Akt., CGAE., CA pada hari Rabu, 25 Januari 2023:

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyampaian laporan Belanja Modal memang tidak ditemui hambatan dan kendala yang signifikan, tetapi kami terlambat dalam penyampaian laporan realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2021 dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19 tetapi masih bisa kita handle dan bisa dibilang pengelolaan keuangan kami paling baik daripada OPD- OPD lainnya.

Pendapat lain disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Dalam penyampaian pelaporan belanja modal memang tidak terdapat kendala yang signifikan, walau dapat dilihat dari kondisi Kota Bandar Lampung dalam kasus covid-19 tidak sama seperti daerah lain contohnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga dalam penyampaian laporannya pada tahun 2018 sampai 2021 dapat terlaksanakan tepat pada waktunya baik online maupun offline, sedangkan penyampaian laporan pada tahun 2021 harus mengalami kendala yaitu pandemi covid-19 yang dimana refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19. Penyusunan anggaran belanja maupun pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung sudah dilakukan secara maksimal walau pada tahun 2021 terjadinya kendala yang dikarenakan Covid-19 yang akhirnya menyebabkan keterlambatan waktu dalam pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, ketepatan waktu laporan pada faktor tepat waktu dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung kurang Efektif.

3.3. Upaya – Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam Efektivitas Belanja Modal

Memaksimalkan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintahan membutuhkan tahapan serta perencanaan yang baik, maka pemerintah harus berpikir visioner dan kritis dalam penerapan dalam hal pengelolaan keuangan berkaitan dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD. Pengelolaan keuangan dalam Kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD yang diterapkan diberbagai daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, setiap daerah mempunyai permasalahan yang ditemui dalam proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan laporan keuangan. Adapun

upaya- upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam Efektivitas Belanja Modal, yakni:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memberikan pelayanan secara Online.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Zakky Irawan, S.E.,M.M. terkait keterbukaan dan transparansi anggaran pada hari Rabu, 25 Januari 2023 :

Dilihat dari pengelolaan anggaran belanja modal yang terjadi dari tahun 2020 ke 2021 yang dimana mengalami penurunan Efektivitas dikarenakan adanya pandemi covid-19, tetapi kami telah mengupayakan dengan baik atas hal tersebut. Walaupun kami terdapat Work From Home tetapi semua pelayanan masih bisa kami lakukan dengan online yang dimana masyarakat bisa mendapat pelayanan dengan baik walaupun pandemi covid-19. Hal ini dibantu juga dengan upaya pemerintah yaitu dengan terus melakukan swiping dijalan terkait protocol kesehatan seperti penggunaan masker, pembuatan tempat cuci tangan dan fasilitas handsanitizer di tempat-tempat umum, serta pendisiplinan vaksin bagi masyarakat kota bandar lampung.

Berdasarkan uraian di atas, kesejahteraan masyarakat meningkat pada faktor tercapai tujuan dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sudah Efektif.

2. Memaksimalkan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan strategis pemerintah serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pengelolaan belanja harus dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan. Pengelolaan belanja sendiri mencakup mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan. Pada masa pandemi covid ini, dalam pengelolaan keuangan salah satunya belanja daerah sudah pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya.

Pendapat lain disampaikan oleh salah satu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Bapak Andi Budiman, S.E. pada hari Rabu, 25 Januari 2023 : Dalam pengelolaan anggaran belanja, dapat dikatakan sudah baik karena minim kendala dan hambatan. Selain itu BPKAD Kota Bandar Lampung sudah menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan, dan kendala yang berarti terdapat pada waktu yang diberikan oleh kementrian dalam penginputan data sangatlah singkat, sehingga seluruh perangkat yang menangani masalah keuangan harus bekerja lebih ekstra agar tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penginputan data anggaran APBD.

Berdasarkan uraian di atas, meningkatkan standar pengelolaan belanja daerah pada faktor tercapai tujuan dalam Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sudah Efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dilakukan dengan mengamati bagaimana transparansi ataupun penggunaan anggaran belanja modal sesuai dengan teori ahli yang digunakan. Widowati dan Fatimah dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2015-2018. Penelitian selanjutnya oleh Cici Sitti Hejaerah Bunna tahun 2021, dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Penelitian selanjutnya oleh Rano Asoka tahun 2019 berjudul Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Herman Djaja tahun 2015, dengan judul Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pamekasan. Penelitian yang terakhir yaitu oleh Oktania Nurussyfa dan Endang Kartini Panggiarti pada tahun 2020, dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

Kelima penelitian tersebut meneliti di lokus yang berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Selain itu, penulis meneliti lebih dalam terkait Efektivitas Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang dimana pada tahun 2020 ke 2021 terjadi pandemi Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa a) Tingkat Efektivitas anggaran Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2018 berada pada rasio 92,74% (Efektif), kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 92,80% (Efektif), pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 90,53% (Efektif), Kemudian pada tahun 2021 rasio Efektivitas menurun drastis menjadi 73,34% (Kurang Efektif). Dilihat dari jumlah target dana realisasi belanja modal Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 adanya pandemi Covid-19 dimana anggaran belanja modal di fokuskan untuk Covid-19, sehingga dapat diartikan kinerja pelaksanaan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalami penurunan Efektivitas, b) Hambatan dalam Efektivitas belanja modal, yang menjadi faktor penghambat utama dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja modal adalah waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat terbilang singkat serta adanya perubahan anggaran pada tahun 2021 yang menyebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19, c) Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menangani hambatan yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pegawai pegawai mendapat kebijakan dengan Work From Home (WFH), yaitu mengupayakan dengan pelayanan online yang terbaik untuk masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait analisis lebih dalam faktor makro dan mikro secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memberikan saran yaitu a) Hendaknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung meningkatkan kompetensi serta jumlah ASN dalam bidang pengelolaan keuangan guna mempercepat proses pengelolaan serta penginputan data, b) untuk peneliti selanjutnya, cakupan penelitian dan topik penelitian telah diperluas ke tingkat yang lebih luas, diharapkan dapat mempelajari faktor-faktor lain yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung selain pengelolaan Belanja Modal

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
- Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(2), 76. <https://doi.org/10.51877/jiar.v2i2.84>
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Martanti, D. E., Ekonomi, F., Islam, U., Blitar, B., Ekonomi, F., Islam, U., Blitar, B., & Daerah, K. (2019). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Akuntansi UN PGRI Kediri*, 1, 191–197.
- Oktaviani, J. (2018). Landasan teori belajar modal. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sam Ratulangi. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, vol. 3
- Widowati, S. A., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *Economics and Education Journal (Ecoducation)*, 4(1), 71–82. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v4i1.1799>
- Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Quanta*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 83-84.